



**SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
GERAKAN OIKUMENIS UNTUK KEADILAN EKOLOGIS
DI SUMATERA UTARA**

Kompleks Kantor Distrik V HKBP Sumatera Timur, Jln. Gereja No.35^a Kec. Siantar Selatan, Kota
Pematang Siantar, Sumatera Utara 21118

Ketua: Pastor Walden Sitanggang | Sekretaris: Pdt. Dr. JP. Robinsar Siregar | Bendahara: Delima Silalahi
081265109719 081263438009 081362760428

**PERNYATAAN SIKAP
SEKRETARIAT BERSAMA GERAKAN OIKUMENIS UNTUK KEADILAN EKOLOGIS
di SUMATERA UTARA
Medan, 10 November 2025**

Mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan adalah tanggung jawab moral dan etis kita bersama. Semua pihak — masyarakat adat, petani, buruh, nelayan, akademisi, media, lembaga agama, pemerintah, dan pelaku usaha— wajib bahu-membahu mewujudkannya, khususnya di kawasan Tapanuli Raya, Sumatera Utara. Kami menegaskan, kondisi ekologis dan sosial di Tapanuli Raya saat ini sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara mengambil sikap tegas dengan menyampaikan persoalan ini secara langsung melalui Aksi Damai Akbar kepada Gubernur Sumatera Utara pada hari ini, Senin, 10 November 2025.

Kami mencatat dan menyaksikan:

Bencana Ekologis dan Korban Kemanusiaan: Kehadiran PT Toba Pulp Lestari (TPL) selama hampir empat dekade di Sumatera Utara telah memicu dampak buruk yang sistemik. Perusakan hutan secara masif dan berkelanjutan telah melahirkan serangkaian bencana ekologis yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Bencana ini tidak hanya merenggut korban jiwa dan materi, tetapi juga menyisakan trauma mendalam, terutama bagi perempuan dan anak-anak.

Peningkatan Pelanggaran HAM: Selain kerusakan lingkungan, PT TPL juga menjadi katalisator bagi meningkatnya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan konflik agraria di Tapanuli Raya. Hak-hak masyarakat adat atas ruang hidup dan tanah ulayat dirampas. Konflik agraria yang eskalatif berdampak pada tingginya ancaman kriminalisasi, intimidasi, dan teror terhadap masyarakat adat serta aktivis pembela lingkungan dan HAM.

Keberpihakan Pemerintah yang Mengkhawatirkan: Pemerintah, yang seharusnya hadir melindungi rakyat, justru terkesan berpihak pada kepentingan korporasi. Hal ini tecermin jelas dari pernyataan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, pada 13 Oktober 2025, yang menyatakan bahwa PT TPL memiliki "alas hak" yang sah dan kegiatannya "tidak boleh dihalangi."

Pernyataan Gubernur tersebut mengabaikan fakta nyata perusakan lingkungan dan pelanggaran hak masyarakat adat yang telah berlangsung lama. Pemerintah tidak seharusnya hanya berpedoman pada izin-izin formal Perusahaan, namun wajib mendahulukan aspek kelestarian lingkungan dan penegakan HAM.

Berangkat dari keprihatinan di atas, Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara, bersama seluruh elemen masyarakat yang hadir, menyerukan dan menyatakan sikap tegas:

1. Mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk menyampaikan pernyataan kepedulian terhadap masyarakat yang dikriminalisasi dan kerusakan alam yang dilakukan oleh PT TPL.
2. Mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk hadir di tengah masyarakat yang mengalami kriminalisasi oleh PT TPL.
3. Mendesak Gubernur Sumatera Utara untuk menyurati Pemerintah Pusat/Presiden RI agar segera mencabut izin operasional PT TPL.
4. Memohon Presiden Prabowo mencabut izin dan menutup operasional PT TPL.



**SEKRETARIAT BERSAMA (SEKBER)
GERAKAN OIKUMENIS UNTUK KEADILAN EKOLOGIS
DI SUMATERA UTARA**

Kompleks Kantor Distrik V HKBP Sumatera Timur, Jln. Gereja No.35^a Kec. Siantar Selatan, Kota
Pematang Siantar, Sumatera Utara 21118

Ketua: Pastor Walden Sitanggang I Sekretaris: Pdt. Dr. JP. Robinsar Siregar I Bendahara: Delima Silalahi
081265109719 081263438009 081362760428

Kami menyampaikan pernyataan sikap ini dengan harapan seluruh pemangku kepentingan dapat menjadikan Kawasan Danau Toba dan Tapanuli Raya sebagai rumah bersama yang membawa damai, keadilan, dan kesejahteraan bagi semua yang menghuninya.

Hormat kami,

Pimpinan Aksi,

Roki Pasaribu, SH., MH

Ketua,

Pastor. Walden Sitanggang OFMCap



Sekretaris,

Pdt. Dr. JP. Robinsar Siregar, M.Th